

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ekologi Politik

Berbicara mengenai hubungan manusia dan lingkungan memang tidak akan ada habisnya. Dominasi manusia terhadap alam atau lingkungan memberikan suatu eksploitasi untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Krisis lingkungan yang sedang terjadi dan menurunnya kondisi lingkungan makin hari makin memburuk. Pemanasan global, punahnya spesies, dan kekeringan panjang menjadi bentuk permasalahan yang diberikan alam sebagai akibat dari manusia itu sendiri. Sejatinya manusia telah menggunakan 30% sumber daya alam yang padahal penggunaannya lebih banyak dibandingkan produksi alam tiap tahunnya. Di satu sisi jumlah demografi penduduk yang tiap tahun bertambah dan kebutuhan akan alam semakin besar maka ekspansi besar-besaran terjadi (Andayani dan Indah. 2023).

Dalam menjembatani permasalahan antara manusia dan alam atau lingkungan tersebut, negara dalam hal ini tentu harus memiliki sikap tertentu sebagai pelaksanaan dari perannya dalam mengatasi persoalan tersebut. Secara sumber daya, negara memiliki kewajiban untuk mengkaji persoalan kerusakan lingkungan. Hal ini sendiri didasarkan pada Undang-Undang 1945 pada pasal 33 ayat 3 bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan

pasal 33 ayat 4 Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dijelaskan mengenai kekuasaan negara dan kehidupan warga negara secara ekonomi diatur dalam konstitusi. Berpengetahuan lingkungan dan berkelanjutan ditulis dalam pasal 33 ayat 4 yang diterjemahkan oleh UU nomor 32 tahun 2009 dengan definisi lingkungan hidup yaitu kesatuan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (Andayani dan Indah. 2023).

Lingkungan mempunyai sebuah ciri khas yang harusnya dapat menjadi titik rujukan bagi politik sebagai alat pengaturan untuk dapat mengedepankan kepentingan bersama. Tiga ciri khas dari lingkungan ini sendiri yaitu (Cornelis Lay, 2007):

1. Watak lingkungan untuk sebuah kesatuan sistem yang melewati pemisah administrasi pemerintah dan politik. Dalam hal ini sejatinya lingkungan tidak bisa setia apalagi dibatasi oleh ruang yang diciptakan oleh politik. Lingkungan dalam hal ini menapikan batas-batas negara dan konseptualisasi kedaulatan. Suatu kekuasaan negara manapun, tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk membatasi lingkungan untuk bergerak ke wilayah negara lain. Lingkungan tidak akan peduli dan tidak

pernah peduli terhadap dinamika politik atau pemerintah dalam suatu negara.

2. Lingkungan disangkut pautkan terhadap kepentingan manusia subjektif sebagai makhluk. Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa setiap individu tentu saja membutuhkan lingkungan sebagai ruang dan tempat kehidupan yang harus bisa untuk didapatkan dan tidak dapat ditunda. Lingkungan dipersiapkan untuk masa depan dan siklus regenerasi ketahanan manusia yang ada di bumi, karena secara dasar kita hidup bukan hanya untuk hari ini saja. Dalam hal ini lingkungan memiliki makna sebagai ruang ekonomi, kebiasaan dan budaya. Sehingga dalam hal ini lingkungan bisa dijadikan alasan pertama dalam pengaturan politik negara.
3. Lingkungan dapat memberikan hukuman jika manusia mengabaikannya. Kejadian bencana alam dan kemalangan yang diterima manusia sebagai akibat dari kita memperlakukan lingkungan tidak semestinya, dampak yang dirasakan tidak akan melihat stratifikasi sosial, baik secara kelas sosial, kekayaan, suku, agama, dan kategori heterogen yang ada dalam manusia. Besarnya hukuman yang diberikan alam, tentunya itu akan sebanding dengan bagaimana kita memperlakukan alam.
Ekologi politik dalam hal ini tentu menjadi bidang yang cocok untuk melihat dan memahami terkait dengan bagaimana konsep interaksi antara manusia dan lingkungan. Teori ekologi politik di dunia ketiga mulai berkembang pada awal tahun 1970-an dimana makalah dari Wolf (1972) dinilai sebagai salah satu karya paling awal dari adanya teori ekologi politik ini sendiri.

Secara sederhana, ekologi politik dapat didefinisikan sebagai suatu studi yang kemudian banyak membahas mengenai adanya konflik ekologi mulai dari konflik atas akses dan kontrol terhadap sumber daya alam sampai pada biaya dari adanya kerusakan alam akibat eksloitasi itu sendiri. Di dalam kajian ekologi politik ini sendiri terdapat konteks mulai dari ekonomi, kekuasaan dan politik dimana analisis mengenai relasi kekuasaan politik terletak dalam urutan pertama untuk menjelaskan terkait dengan bagaimana interaksi antara manusia dan lingkungan yang mana interaksi tersebut banyak terkait dengan mulai menyebarinya degradasi terhadap lingkungan itu sendiri (Cahyati, 2014; Bryant dan Bailey, 2005).

Pertanyaan yang kemudian muncul yaitu terkait dengan apa perbedaan antara ekologi politik dengan politik lingkungan. Secara umum, perbedaan utama dari keduanya yaitu terletak pada perbedaan secara teoritis dan empiris terkait dengan perbedaan dari rumpun ilmu keduanya. Hal ini diketahui bahwa politik lingkungan terletak kedalam rumpun ilmu politik dimana banyak menerapkan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tradisional terhadap permasalahan lingkungan seperti bagaimana dampak isu hijau terhadap proses politik formal dan sampai pada bagaimana peran negara terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini tentu berbeda dengan ekologi politik yang mana banyak mengeksplorasi bagaimana dimensi politik terkait dengan interaksi antara manusia dan lingkungan. Dalam hal ini ekologi politik banyak menilai terkait dengan adanya dampak daripada lingkungan yang dipolitisasi oleh kekuasaan dari berbagai aktor yang terlibat, sedangkan politik lingkungan hanya mempertimbangkan sektor lingkungan hidup apabila hal tersebut dapat mengganggu proses politik formal saja.

Penulis menggunakan teori Bryant dan Bailey dalam buku *Third World Political Ecology*, dimana penjelasannya sangat relevan dengan kondisi di Indonesia yang merupakan negara yang lahir di dunia ketiga. Ekologi politik dunia ketiga untuk kontemporer membahas bagaimana geografi dan eksplorasi kekuasaan politik serta hubungan antara manusia dan lingkungan. Eksplorasi tersebut menjadi tumpang tindih dengan prihatin dalam politik lingkungan, hal yang menjadi sorotan yakni mengenai kepentingan kolektif dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Akan tetapi ekologi politik memiliki cakupan pembahasan yang lebih luas ketimbang politik lingkungan. Akhirnya pendekatan pertama membahas bagaimana mengatasi berbagai kepentingan dalam aktivitas politik *non-negara* dalam masyarakat *civil* yang dinafikan oleh pendekatan kedua. Pedulinya aspek spasial terkait hubungan manusia lingkungan juga yang membedakan ekologi politik dan politik lingkungan (Bryant dan Bailey, 2005).

Inti dari adanya gagasan mengenai lingkungan yang dipolitisasi ini sendiri yaitu pengakuan bahwasannya permasalahan lingkungan memang tidak dapat dipahami apabila hal ini dipisahkan dari dua konteks baik politik maupun ekonomi dimana permasalahan tersebut diciptakan. Para ahli ekologi politik memulai premis bahwa terjadinya perubahan lingkungan bukanlah terjadi melalui proses yang netral karena bencana alam saja, melainkan dapat terjadi karena adanya dampak dari kesenjangan sosio-ekonomi dari proses politik yang ada. Adapun gagasan dalam lingkungan yang dipolitisasi memiliki pengertian dan topografinya terhadap implikasi ekologi politik yakni (Bryant dan Bailey, 2005):

1. Ukuran

Dalam pembahasan lingkungan yang dipolitisasi memiliki dimensi-dimensi diantaranya keseharian, episodik, dan sistematik. Dimensi keseharian merupakan konflik dan ketidakadilan lingkungan yang sering secara terus menerus atau rutin dalam kehidupan masyarakat. Dimensi episodik merupakan konflik yang terjadi dalam masalah lingkungan yang hadir secara tidak terduga dalam kurun waktu tertentu biasanya dipicu atas peristiwa yang spesifik. Dimensi sistematik merupakan konflik dan ketidakadilan lingkungan karena hasil dari struktur sosial, ekonomi, dan politik.

Tabel 2.1
Dimensi Ukuran Lingkungan

Dimensi	Perubahan Fisik	Respon Politik	Konsep Kunci
Harian	Erosi tanah, deforestasi, salinasi	Resistensi/Protes masyarakat terkena dampak	Marjinalisasi
Episodik	Banjir, badai, kekeringan	Bantuan bencana	Kerentanan
<i>Sistematik</i>	<i>Konsentrasi pestisida, GMO, nuklir</i>	<i>Ketidakpercayaan terhadap pakar/ahli</i>	<i>Risiko</i>

Sumber: Bryant dan Bailey, 2005

Sebagian besar para ahli ekologi politik tidak menyoroti isu yang bersangkutan dengan sistematik dan hanya fokus kepada dimensi harian dan episodik padahal ketiga dimensi tersebut memiliki hubungan satu sama lain. Konflik dalam dimensi harian memperburuk episodik yang kedua terjadi

karena pada masalah sistematik yang dalam. Sehingga poin-poin selanjutnya akan membahas hubungan antara dimensi harian dan episodik meskipun nantinya ada sebagian menyentuh kepada dimensi sistematik yakni:

- 1). Kedua dimensi antara harian dan episodik terjadi tidak ada secara alami.

Permasalahan lingkungan ada beberapa isu yang terjadi karena dilakukan manusia yang memiliki peran dalam meningkatnya dan besarnya perubahan lingkungan, hal itu didasarkan pada beberapa aktivitas manusia dengan melupakan proses perubahan akibat manusia itu sendiri. Karena secara dasar pembangunan manusia memunculkan kemampuan dalam memanipulasi untuk mengontrol proses fisik atau biologis yang seolah-olah itu terjadi karena alam.

- 2). Kedua dimensi antara harian dan episodik memiliki keterhubungan.

Hubungan tersebut terbentuk oleh hubungan sosial yakni aktivitas manusia. Sehingga faktor sosial utamanya adalah marginalisasi, itu terjadi ketika aktor akar rumput terpaksa menggunakan lahan yang secara ekonomi marginal yang diakibatkan politik yang terpinggirkan.

- 3). Kedua dimensi antara harian dan episodik memiliki kaitan erat dengan naiknya kesenjangan sosial dan ekonomi. Proses perubahan harian contohnya lahan yang dimiliki individu tidak sama dan dapat memberikan hubungan dengan aktor yang terpinggirkan karena kendali mereka untuk kehidupan. Di satu sisi perubahan lingkungan juga memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi karena perubahan tersebut

dengan mengurangi sumber daya dan kekuasaan dari aktor yang lemah dan memperkuat kekuasaan bagi aktor yang kuat.

- 4). Kedua dimensi antara harian dan episodik memiliki hubungan dengan proses politik. Perubahan lingkungan memberikan gambaran bahwa hal tersebut memperkuat kontrol politik bagi aktor yang berkuasa terhadap aktor yang lemah. Atas dasar itulah sering terjadi konflik yang memunculkan respon dari aktor yang lemah untuk melawan untuk mengembalikan status kondisi kesenjangan.

2. Skala

Dalam lingkungan yang dipolitisasi memiliki bentuk bagaimana perubahan dalam skala yang berbeda-beda. Skala merupakan alat untuk menganalisis hal penting untuk memahami bagaimana permasalahan lingkungan, kekuasaan, dan politik di berbagai tingkatan. Keberadaan perubahan lingkungan terbentuk karena adanya kontribusi aktor, dampak terhadap manusia, dan upaya penyelesaiannya. Skala tersebut terdiri dari skala lokal mengacu pada wilayah yang dimana interaksi manusia dan lingkungan terjadi. Permasalahan muncul berbentuk seperti perampasan lahan, pencemaran lokal, dan ketidakmerataan sumber daya alam. Permasalahan lingkungan dalam skala lokal selalu melibatkan komunitas lokal, adat, petani, dan lain-lain. Dimana dampak tersebut berasal dari kebijakan dan eksplorasi sumber daya yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Skala regional mengacu kepada kebijakan atau regulasi dan dinamika politik yang terjadi di dalam suatu daerah atau regional di negara tertentu. Skala regional ini sendiri juga mencakup antara skala lokal dan nasional (sub-nasional provinsi dan batas negara).

Skala nasional mengacu kepada kebijakan atau regulasi dan dinamika politik yang terjadi karena negara atau pemerintah pusat. Dalam skala nasional negara menjadi kunci untuk pengelolaan dan mengatur dalam pengelolaan lingkungan dengan cara membentuk peraturan perundangan, kebijakan ekonomi, dan program konservasi.

Skala global mencakup pada proses dinamika yang terjadi karena keterlibatan semua negara di dunia terkait permasalahan lingkungan seperti iklim, perdagangan internasional, dan kebijakan global. Keterlibatan antar akor, organisasi, industri, dan regulasi internasional sebagai bentuk instrumen pembentukan penyelesaian lingkungan. Hal tersebut terjadi karena banyak permasalahan lingkungan yang harus melibatkan kesepakatan internasional dalam mengatur proses penyelesaian lingkungan.

Contoh praktis adalah bagaimana eksplorasi sumber daya alam di negara berkembang seringkali didorong oleh permintaan pasar global, yang kemudian mempengaruhi kebijakan nasional, dan akhirnya memiliki dampak langsung pada komunitas lokal. Dengan memahami interaksi lintas skala ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika kekuasaan dan ketidakadilan dalam konteks ekologi politik.

Ada beberapa hal yang dibahas mengenai skala yakni terkait penyebaran biaya dan manfaat dalam permasalahan lingkungan, dalam kerusakan lingkungan seringkali yang terkena dan merasakan dampak adalah kaum yang lemah dibandingkan yang kuat. Akan tetapi kaum yang kuat juga di satu sisi tidak bisa lepas dari kontribusi biaya yang besar untuk menanggulangi permasalahan lingkungan, di satu sisi menurut banyak penelitian di bidang ekologi politik bahwa kerugian terbesar tetap dirasakan oleh kaum lemah hal tersebut melekat pada skala lokal dan regional. Sama hal nya juga dengan skala global permasalahan ketidakmerataan ini justru bersifat komplek, sebagai contoh efek rumah kaca yang berasal dari kepentingan ekonomi, justru disebabkan oleh negara-negara pertama dan kedua yang memberikan dampak kepada negara ketiga.

Selanjutnya mengenai peran dari berbagai aktor dalam penyelesaian masalah lingkungan. Pada skala global negara memainkan peran penting dalam penyelesaian dengan menggunakan pendekatan global yakni kerja sama antar negara, tidak bisa dipungkiri juga kontribusi dari peran industrial (lembaga multilateral) dalam pemberian bantuan teknis dan finansial. Selain itu juga kontribusi kepentingan dari ilmu negara pertama dan para ahli seringkali menjadi landasan dan patokan, justru hal tersebut menjadi sebuah kerentanan akan kepentingan mereka yang dibalut dengan solusi. Sistem dunia yang mengadopsi ekonomi kapitalis memberikan suatu gambaran bahwa solusi yang ditawarkan justru tidak sepenuhnya menjadi cara dalam penyelesaian. Dalam skala lokal dan regional memiliki kontribusi yang

minim, pemerataan peran terlepas dari adanya marginalisasi yang menghasilkan kaum lemah dan kuat harus tetap bisa berkontribusi dalam perbaikan hal tersebut. Sehingga hal itu menunjukkan ketidaksesuaian antara siapa yang menanggung biaya, terkena dampak, dan tanggung jawab.

Terakhir bahwa dalam permasalahan lingkungan berkaitan dengan peran akar rumput dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Kepentingan yang dibangun oleh kaum yang kuat dalam mempengaruhi hubungan antara manusia dan lingkungan menghasilkan ketidak seimbangan kontribusi bagi kaum lemah. Mereka seringkali diabaikan oleh kaum yang kuat, sehingga kelompok-kelompok yang lemah mempunyai konstruksi dalam dinamika hubungan antar kelompok dan ini justru dimanfaatkan oleh kelompok mereka yang memiliki pengaruh untuk membentuk hubungan dengan kaum mereka yang tidak didengarkan pada skala lokal. Hubungan tersebut membentuk kelompok LSM yang mereka memiliki ciri khas bahwasannya mereka tidak berkontribusi dalam penyelesaian skala apapun, tetapi mereka hadir untuk memberikan upaya penyelesaian dalam permasalahan lingkungan, akan tetapi bisa saja LSM tidak berkontribusi dan condong akan memiliki kepentingan mereka yakni keuntungan yang didapat atas permasalahan lingkungan dengan menggalang dana terhadap kelompok yang lemah. Meskipun demikian, LSM menyuarakan terkait penyelesaian lingkungan secara demokrasi dan menjadi ajang kampanye bagi para aktor akar rumput.

3. Kekuatan

Cara-cara yang dilakukan oleh aktor dalam mengontrol terhadap lingkungan aktor lainnya yaitu, aktor dapat mengontrol dengan sumber daya lingkungan, menggunakan pengaruh dan menentukan dampak ke lingkungan yang tidak merugikan dirinya, menggunakan kontrol dan prioritas masyarakat untuk proyek dan permasalahan lingkungan, dan menggunakan cara diskursif. Kekuatan tersebut digunakan sebagai instrumen berbagai faktor untuk proses pengendalian dan pengaruh terhadap lingkungan. Kekuatan tersebut terdiri dari:

1. Kekuatan negara merupakan kekuatan besar dalam mengontrol lingkungan dengan cara membentuk kebijakan, hukum, dan penyebaran sumber daya alam. Kekuatan tersebut digunakan dalam melindungi lingkungan untuk membentuk keadilan sosial atau kepentingan elit (perusahaan) yang berdampak pada pengorbanan masyarakat dan lingkungan.
2. Kekuatan ekonomi merupakan kontrol atas dasar penggunaan sumber daya keuangan dan produk dalam mempengaruhi kebijakan, lingkungan, dan penggunaan sumber daya alam. Aktor yang memiliki kekuatan tersebut terdiri dari perusahaan multinasional, investor, dan elit.
3. Kekuatan sosial merupakan pengaruh yang dimiliki oleh masyarakat akar rumput dan LSM yang membentuk gerakan sosial yang mempengaruhi kebijakan atau regulasi terkait lingkungan. Hal tersebut terjadi karena mereka memahami betul terkait permasalahan lingkungan

yang terjadi baik dalam proses pengelolaan atau hal-hal yang merusak lingkungan.

4. Kekuatan ideologis merupakan bentuk pengaruh terkait pemikiran mengenai interaksi antara manusia dan lingkungan untuk membentuk sebuah tindakan dalam pemanfaatan sumber daya alam.
5. Kekuatan internasional merupakan pengaruh yang berasal dari aktor global (PBB, Bank dunia) perjanjian, dan perusahaan multinasional terkait kebijakan atau regulasi lingkungan di berbagai negara.

Adapun pendekatan ekologi politik menurut Bryant dan Bailey terbagi menjadi (Hakim, 2018; Satria 2007; Bryant dan Bailey, 2005):

1. Pendekatan yang menitikberatkan pada problem masalah lingkungan secara detail, yang bertumpuk pada pandangan atau bidang kajian tradisional geografi yang memiliki hubungan dalam usaha untuk memahami manusia terhadap lingkungan atau analisis permasalahan yang membahas dampak manusia terhadap lingkungan;
2. Pendekatan yang menitikberatkan pada konsep yang memiliki hubungan pertanyaan ekologi politik yaitu, eksplorasi konstruksi. Analisis mendominasi sekitaran, seperti dominasi pembangunan berkelanjutan dalam rangka menjelaskan pembahasan hubungan manusia dengan alam. Ditambahkan dengan adanya ekonomi politik;
3. Pendekatan yang menitikberatkan pada konsep ekologi dalam wilayah geografis atau fokus pembahasan ekologi dengan politik dengan studi kasus pada wilayah tertentu;

4. Pendekatan yang menitikberatkan pada pertanyaan ekologi politik dengan karakteristik sosial ekonomi seperti kelas, gender, dan etnik.
5. Pendekatan yang menitikberatkan pada konsep kebutuhan untuk suatu kepentingan karakteristik dan tindakan para aktor dalam memahami konflik politik dan ekologi.

Pendekatan yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan tentang bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Dalam Penanganan Dampak Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Karangkandri yaitu dengan menggunakan pendekatan aktor. Pendekatan aktor dalam mengkaji ekologi politik berfokus pada pelaku (*actor oriented*) dan didasarkan pada konsep *politicized environment* (pada tabel 2.1), yakni bahwa pemahaman persoalan lingkungan, memiliki *urgensi* bersamaan dengan politik dan ekonomi yang kemudian dua hal tersebut menjadi pemicu masalah muncul. Dalam hal ini terdapat beberapa alasan dari asumsi pendekatan aktor yaitu (Dewi dkk, 2022; Satria, 2007; Bryant dan Bailey, 2005):

1. Biaya dan manfaat yang dinikmati para aktor yang tidak merata terhadap lingkungan. Adanya perubahan lingkungan akibat dari dampak aktivitas industri tentu menimbulkan adanya biaya (resiko) yang kemudian sama-sama dihadapi oleh berbagai pihak, akan tetapi disini perlu dilihat lagi mana pihak yang memang benar-benar mengalami kerugian yang besar akibat adanya perubahan ini dan mana pihak yang justru tetap diuntungkan walaupun dengan adanya perubahan lingkungan seperti ini. Dalam hal ini masyarakat sekitar tentu menjadi pihak yang cukup dirugikan atas

perubahan lingkungan dari dampak aktivitas industri yang kemudian mampu menjadi bukti bahwa biaya dan manfaat yang dinikmati oleh para aktor tidak merata.

2. Pembagian biaya dan manfaat yang tidak merata dapat menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi. Adanya distribusi biaya dan manfaat lingkungan yang kemudian tidak merata ini sendiri tentu tidak dapat dipungkiri justru akan memperkuat ataupun mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Adanya perubahan terhadap lingkungan akibat dari permasalahan pembangunan tentu tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan sosial dan ekonomi yang dalam hal ini sangat mempengaruhi terkait dengan status quo politik dan ekonomi masyarakat.
3. Adanya implikasi politik dengan terjadi perubahan kekuasaan antar hubungan aktor. Perbedaan dampak sosial dan ekonomi dari adanya perubahan lingkungan ini sendiri rupanya juga sangat mempengaruhi politik dengan kaitannya terhadap perubahan kekuasaan antar para aktor itu sendiri. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya perubahan lingkungan ini tidak hanya menciptakan kekayaan bagi sebagian pihak saja dan memiskinkan sebagian pihak lain, akan tetapi juga sangat mempengaruhi dan mengubah kemampuan para aktor yang satu untuk mengontrol atau melawan aktor lainnya.

Dalam hal ini Bryant dan Bailey cukup banyak memberikan *point of view* terkait dengan konteks pendekatan aktor dimana dijelaskan soal aktor-aktor yang

terlibat dalam ekologi politik mulai dari negara, pengusaha, organisasi multilateral, lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan aktor akar rumput. Akan tetapi disini juga perlu dipahami bahwa para aktor ini sendiri mempunyai hubungan yang tidak setara antara satu sama lain yang kemudian dalam hal ini menjadi faktor kunci dalam memahami bagaimana pola interaksi antara manusia dan lingkungan itu sendiri. Adanya hubungan yang tidak seimbang ini sendiri tentu pada akhirnya harus dikaitkan dengan kekuasaan yang memang dimiliki oleh masing-masing aktor tersebut yang dalam hal ini tentu erat kaitannya dengan konflik yang terjadi dalam konteks perubahan lingkungan itu sendiri.

Negara disini memiliki dua peran sekaligus yakni sebagai aktor atau bisa disebut sebagai pihak yang memang harus memenuhi kepentingan bersama termasuk dalam pemenuhan kebutuhan listrik akan tetapi juga dituntut sebagai aktor pelindung lingkungan. Dalam hal ini banyak yang kemudian mengkritisi peran dari negara dimana negara diyakini sulit untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan global karena negara diyakini bersifat kapitalis global yang mengorbankan lingkungan. Negara tidak mampu menyelesaikan permasalahan di berbagai tingkatan, terlalu kecil dalam permasalahan global dan regional dan terlalu besar dalam permasalahan lokal. Kritik terhadap negara karena memang pada dasarnya ekonomi kapitalis global yang menjadi titik permasalahan terhadap lingkungan. Negara yang memang diharapkan menyediakan barang publik seperti keamanan atau infrastruktur sosial dan fisik. Aktivitas industri yang mengeksplorasi sumber daya alam dengan maksimal untuk dieksport memunculkan konflik adanya marginalisasi terhadap masyarakat yang dulunya selalu

menggunakan sumber daya alam tersebut (Dewi dkk, 2022; Satria, 2007; Bryant dan Bailey, 2005).

Akan tetapi secara empiris tidak bisa dibuktikan hubungan kapitalis dengan lingkungan bisa searah. Konflik yang muncul diantara keduanya, seperti suatu keputusan negara untuk memberikan batasan terhadap penggunaan sumber daya demi jangka panjang, akan tetapi para pengusaha menginginkannya dengan maksimal. Seperti contoh pembangunan infrastruktur pada suatu negara yang tentu menguntungkan para kapitalis dan di satu sisi mempermudah negara melakukan fungsi kontrol. Aktor yang termarjinalkan memang pada dasarnya mereka tertutupi dengan aktor yang memiliki kekuatan besar, salah satunya aktor akar rumput. Aktor tersebut melalui proses terpinggirkan atau rentan terkait penurunan lingkungan (Dewi dkk, 2022; Satria, 2007; Bryant dan Bailey, 2005).

2.1.2 Negara Dalam Ekologi Politik

Peran Negara dalam penyelesaian kerusakan lingkungan baik secara lokal, regional, dan global memiliki dinamika dalam proses penyelesaian permasalahan tersebut. Berbagai kajian yang menjelaskan bagaimana dilematis negara antara lingkungan, politik, dan ekonomi. Salah satu aspek mengenai analisis peran negara dalam skala global dikatakan bahwa negara merupakan aktor yang menghambat dalam penyelesaian permasalahan lingkungan pada skala global, alasannya karena negara secara realitasnya terus membangun ekonomi yang mengorbankan lingkungan hidup. Minim sekali dalam upaya penyelesaian yang dilakukan karena negara sangat menjaga kedaulatan terkait usulan sistem pengelolaan lingkungan yang bersifat global. Di satu sisi sangat sedikit sekali untuk negara yang bisa untuk

menghindari manfaat pembangunan ekonomi (ekonomi kapitalis) yang bersaing, terkhusus terkait pembuangan polusi yang disebarluaskan pada skala global. Kenyataan pahitnya tragedi kepentingan bersama (*global commons*) terjadi karena masing-masing negara terus menggunakan kebijakan dan pelaksanaan yang merusak lingkungan skala global, di satu sisi tidak mau menyerahkan hak atau kedaulatannya (Bryant dan Bailey, 2005).

Aspek kedua mengenai negara berfokus pada ketidakmampuan dalam mengatasi permasalahan lingkungan dengan efektif pada skala mana pun. Negara terlalu kecil untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan regional dan global, dan terlalu besar untuk skala lokal, alasannya karena kemungkinan kesenjangan yang selalu ada dalam kepentingan negara sebagai aktor dan bentuk respon sosial yang dibutuhkan dalam permasalahan lingkungan sangat minim. Sehingga labeling pada negara disebut “wajah janus” yang memiliki makna memiliki kekuasaan karena dalam hubungan tatanan politik nasional dan internasional. Negara menjadi penghambat bagi aktor akar rumput dan penghalang upaya global dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan (Bryant dan Bailey, 2005).

Negara memainkan posisi yang sangat penting dalam penyelesaian permasalahan lingkungan dimensi tersebut terdiri dari (Bryant dan Bailey, 2005):

1. Negara sebagai pengatur. Negara memiliki peran sebagai pengatur utama dalam penggunaan sumber daya alam. Negara membentuk kebijakan dan regulasi yang mengelola bagaimana penggunaan sumber daya dan melindunginya. Akan tetapi pada saat pembentuk kebijakan dan regulasi

seringkali terdapat kepentingan ekonomi dan politik yang mengarah kepada ketidak konsistenan dalam pengelolaan lingkungan.

2. Negara sebagai agen kekuasaan. Negara sebagai agen yang mempunyai kekuasaan dalam menentukan akses dan kontrol terkait sumber daya alam. Penyebarluasan kekuasaan tersebut terkadang tidak merata, karena negara dapat memperkuat kekuasaan elit dan mengorbankan aktor yang lemah.
3. Negara dalam hubungan internasional. Dalam negara-negara berkembang terkadang adanya bentuk intervensi dari negara maju dalam pembentukan kebijakan lingkungan dan pembangunan ekonomi. Kebijakan negara berkembang menurut mereka seringkali terpengaruh dengan kondisi global, sehingga membatasi kedaulatan negara dalam mengelola lingkungan.
4. Negara dan konflik lingkungan. Negara seringkali terikat dengan penyebab konflik lingkungan, seperti fasilitator dalam eksplorasi sumber daya alam oleh industri yang memunculkan konflik dengan masyarakat yang bergantung pada kehidupannya terhadap lingkungan.
5. Negara dan pembangunan. Pembangunan dalam perspektif pendekatan lingkungan yang dianut oleh negara berkembang selalu fokus pada pertumbuhan ekonomi yang mengorbankan lingkungan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dinamika lingkungan hidup yang ada di Indonesia mengalami perubahan dan *problem* yang sangat kompleks dalam menentukan hubungan alam dan manusia. Salah satunya kebutuhan akan listrik yang menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kehidupan manusia atau masyarakat yang ada di Indonesia. Diketahui

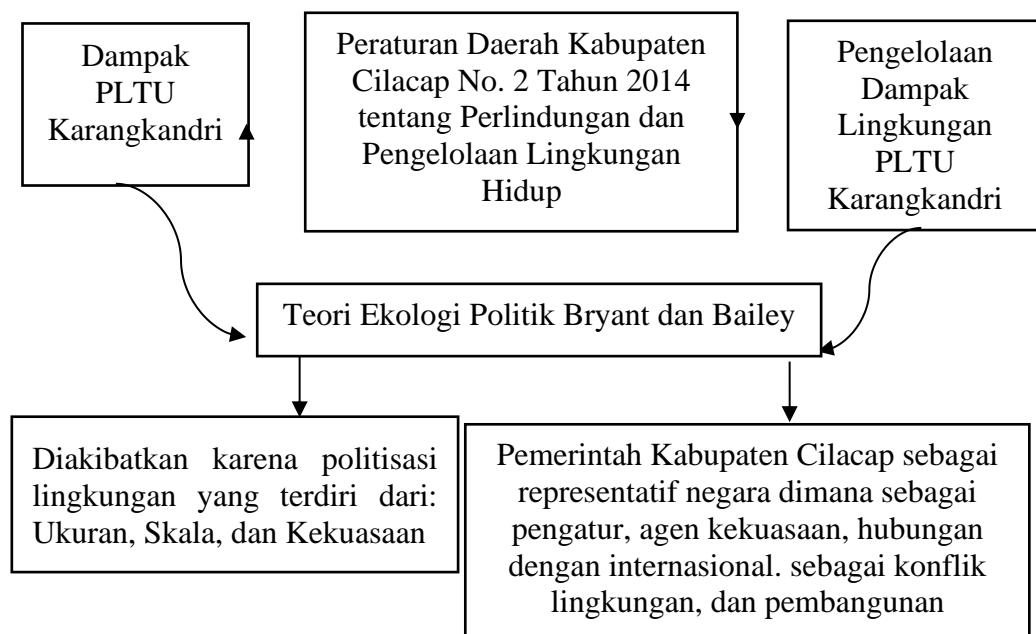
sendiri bahwa kebutuhan akan listrik semakin lama semakin besar jumlahnya yang kemudian membuat pemerintah akhirnya harus mampu mencari model alternatif terkait sumber listrik itu sendiri, yakni dengan adanya PLTU yang secara kapasitas mampu menyumbangkan pasokan listrik yang besar dan bahan bakunya tergolong cukup murah. Akan tetapi disisi lain diketahui PLTU memberikan dampak terhadap lingkungan yang sangat merugikan terhadap masyarakat daerah sekitar PLTU. PLTU Karangkandri merupakan satu contoh yang membuktikan bahwa PLTU dengan bahan bakar batubara pada dasarnya tidak luput dalam memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan pada kehidupan masyarakat Desa Karangkandri terlepas dari dampak positifnya yaitu sebagai penyumbang kebutuhan listrik Jawa-Bali.

Konflik antara masyarakat, *stakeholder* dan perusahaan yang menaungi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Karangkandri selalu diwarnai kepentingan-kepentingan untuk memperjuangkan tugas, hak, dan kewajiban mereka semua. Oleh karena itu dalam hal ini tentu menjadi penting untuk melihat bagaimana peran dari pemerintah yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap yang seharusnya mampu dalam memberikan solusi serta menyelesaikan permasalahan tersebut. Disinilah peran Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap untuk ikut serta dalam melakukan penanganan akan permasalahan mengenai dampak lingkungan akibat dari aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Karangkandri itu sendiri.

Penulis menganalisis bahwasannya kehadiran negara yang diwakilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap menjadi suatu bentuk bahwasannya

kerusakan lingkungan itu bukan hanya didasari atas teknis seperti bencana alam atau sirkulasi alam saja, akan tetapi lebih kepada peran negara yang kurang dalam mengurus hal tersebut yang pada akhirnya menimbulkan dampak lingkungan serta dampak kepada kehidupan masyarakat yang ada didalamnya.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: data olahan penulis